

PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH USIA 16—18 TAHUN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pilih Karini

SMAN 1 Pangkalpinang

Email: pilihkarini77@gmail.com

Abstract

The study is aimed at finding the effect School Participation (APS) of the students of the age 16—18 on poverty rate in Bangka Belitung Province using quantitative research method by implementing statistic analytic of simple regression model. The data used in this study is derived from National Statistics Bureau (BPS) of Bangka Belitung from the year 2012—2016. The results of the study show that the increase of APS has strong relation with the decrease of the poverty level. The result of the study is important for the local government to maintain the increase of APS rate in order to combat the poverty level in Bangka Belitung Province.

Penelitian ini mengkaji pengaruh angka partisipasi sekolah (APS) usia 16—18 tahun terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis statistik yaitu regresi sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik Provinsi Bangkabelitung tahun 2012—2016. Dari penelitian ini, diketahui secara rata-rata bahwa nilai APS berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pemerintah daerah agar terus meningkatkan APS, karena hal tersebut terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: angka partisipasi sekolah, usia 16—18 tahun, tingkat kemiskinan

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang besar bagi pembangunan suatu negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai penyiapan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu hak dan kewajiban (Amaliah, 2015). Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia dan senjata ampuh dalam memberantas kebodohan dan kemiskinan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen

yang ditekankan sebagai penyebab kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan suatu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain pendidikan, pendapatan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, dan kondisi lingkungan.

Salah satu masalah dalam dunia pendidikan terkait masalah kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah pada masyarakat miskin, yakni saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya akses masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah, terutama dari SMP ataupun SMK khususnya usia 16—18 tahun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Akses tersebut dapat bersifat fisik dan juga finansial. Akses finansial terbatas akibat tingginya biaya. Akses ini menciptakan halangan bagi pendidikan masyarakat miskin pada tingkat pendidikan menengah pertama. Sekitar 89% anak dari keluarga miskin menyelesaikan sekolah dasar, tetapi hanya 55% yang menyelesaikan sekolah menengah pertama (Hartono, 2008). Seharusnya pendidikan menjadi media bagi upaya mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar karena hal ini dapat menjadi tali simpul untuk mengurangi benang kusut masalah kemiskinan di negeri ini.

Lantas, mengapa angka partisipasi sekolah usia 16—18 tahun rendah? Seperti yang kita ketahui bahwa angka partisipasi sekolah (APS) adalah jumlah penduduk melekaksara (Suryana, 2007) yang terlibat dalam kegiatan memperoleh pendidikan usia 16—18 tahun atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK). Peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) juga merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu daerah. Hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah APS akan berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Menurut Nirwana (2013), pendidikan juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Dalam konteks ini, partisipasi sekolah menyebabkan persentase penduduk miskin semakin meningkat. Hal ini terjadi karena bagi penduduk yang ingin mengikuti aktivitas formal diperlukan biaya. Bagi warga belajar yang kurang mampu atau rumah tangga yang tergolong miskin, biaya yang diperlukan untuk pendidikan formal menjadi faktor utama yang menjadi penghambat untuk memperoleh pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi sekolah akan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat (Nirwana, 2013).

Menurut Manurung (2015), kemiskinan yang tadinya hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, kini mencakup aspek budaya, keadaan geografis, dan keadaan dalam masyarakat. Salah satu definisi kemiskinan sebagaimana yang

disebutkan oleh Kumalasari (2011) yaitu kemiskinan adalah keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sementara, Manurung (2015) menyatakan bahwa kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang rendah karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan bagi penduduk miskin bukan termasuk kebutuhan primer. Menurut Nirwana (2013), menjadi miskin memiliki hubungan dengan bermacam-macam faktor, mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang-barang, letak geografis, gender, suku, dan keadaan keluarga.

Pendidikan di suatu daerah selalu menjadi tolak ukur kemajuan daerah tersebut dan telah menjadi fokus masalah utama dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Namun, tingkat kemiskinan terbilang masih cukup tinggi, salah satunya di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung. Apakah dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah di suatu wilayah dapat mengurangi kemiskinan di suatu daerah? Untuk itulah penelitian ini mengacu pada jumlah angka partisipasi sekolah dan juga tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangkabelitung. Penelitian ini menggunakan data angka partisipasi sekolah dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangkabelitung pada 14 Juni 2017. Namun, di lain sisi, tingkat kemiskinan di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per tahun 2009 masih menyentuh angka 30 juta orang. Apakah dengan meningkatnya pendidikan seseorang di suatu wilayah dapat mengurangi kemiskinan di suatu daerah? Untuk itulah penelitian ini mengacu pada jumlah tingkat kemiskinan dan juga angka partisipasi sekolah di setiap provinsi di Indonesia.

Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan

kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Sementara, Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan ialah suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. Kepribadian yang dimaksud ini bermakna cukup dalam yaitu pribadi yang tidak hanya pintar dan pandai secara akademis saja, tetapi juga secara karakter. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Carter V. Good, bahwa Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang dipimpin (khususnya di sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat (Sugianto, 2017).

Pendidikan bisa diperoleh secara formal dan nonformal. Pendidikan formal diperoleh melalui program-program yang sudah dirancang secara terstruktur oleh suatu institusi, departemen, atau kementerian suatu negara. Pendidikan nonformal adalah pengetahuan yang didapat manusia (peserta didik) dalam kehidupan sehari-hari (berbagai pengalaman) baik yang dirasakan sendiri atau yang dipelajari dari orang lain (mengamati dan mengikuti).

Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan di suatu daerah (Dewi dkk., 2015). APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah (APS), maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Rumus:

APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk umur 7–12 tahun) X 100% }

APS (13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100% }

APS (16-18)= {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100% }

$APS (19-24) = \{(Jumlah\ penduduk\ berumur\ 19-24\ tahun\ yang\ masih\ sekolah : Jumlah\ penduduk\ umur\ 19-24\ tahun) \times 100\%\}$

Angka partisipasi sekolah usia penduduk usia 7—12 tahun meingkat dari 92,83% pada 1993 menjadi 96,77% pada 2004. Dalam rentang waktu yang sama, APS penduduk usia 13—15 tahun meningkat dari 68,74% menjadi 83,49%. Sementara, APS penduduk usia 16—18 tahun meningkat dari 40,23% menjadi 53,48%. Selain masalah kesenjangan partisipasi pendidikan, kita juga masih menghadapi masalah lain yakni tingginya angka putus sekolah. Jumlah absolute anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi (*drop out*) pada kelompok umur 7—12 tahun tercatat sebanyak 360.692 orang, kelompok umur 13—15 tahun sebanyak 2.006.507 orang, dan kelompok umur 16—18 tahun sebanyak 5.707.718 orang (Susenas, 2004 dalam Utama, 2009).

Masalah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang membutuhkan biaya yang relatif besar. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, akan mengalami kesulitan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan proses pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, banyak masyarakat miskin yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini khususnya dalam pemerataan pendidikan di setiap daerah.

Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika (2000) merupakan keadaan seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Ukuran standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika pada 2012 yaitu sebesar Rp 355.740.00/bulan, dengan kata lain, per individu memiliki penghasilan sebesar Rp 11.000.00/hari. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah standar yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistika dianggap sebagai penduduk miskin. Standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22.000.00/hari.

Robert Chamber (2010) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, sedangkan kelima dimensi

tersebut membentuk suatu perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependency*), dan (5) keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga. Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak. Namun, memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk yang salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan.

Pola kemiskinan menurut Djojohadikusumo (1995) terbagi menjadi empat bagian, antara lain sebagai berikut.

1. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
2. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
4. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Kemiskinan juga menjadi sebuah hubungan sebab akibat dan terdapatnya hubungan kausalitas yang membentuk sebuah lingkaran paradigma kemiskinan. Lingkaran paradigma kemiskinan ini menggambarkan bahwa kemiskinan disebabkan karena kemiskinan itu sendiri “*The vicious circle of poverty*”. Nurkse (1953) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*), kemiskinan dalam suatu negara tidak memiliki ujung pangkal, artinya negara miskin itu karena tidak memiliki apa-apa, dan dengan tidak memiliki apa-apa menyebabkan negara menderita kemiskinan. Negara yang miskin itu miskin karena kebijakan yang miskin yang ada di dalamnya (*a poor country is poor because a poor policy*). Kesalahan pemerintah dalam penetapan kebijakan yang ada menjadi permasalahan yang ada saat ini,

terlebih lagi pada negara yang luas dan masih berkembang seperti Indonesia. Masalah ketimpangan menjadi permasalahan utama yang ada saat ini, khususnya terkait pendidikan. Sehingga, dalam penetapan kebijakan haruslah melihat karakteristik lingkungan dan penduduk yang ada pada daerah tersebut agar dalam penetapan kebijakan dan program-program pemerintah dapat tepat sasaran, khususnya terkait masalah akses pendidikan dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah yang minim fasilitas pendidikan dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

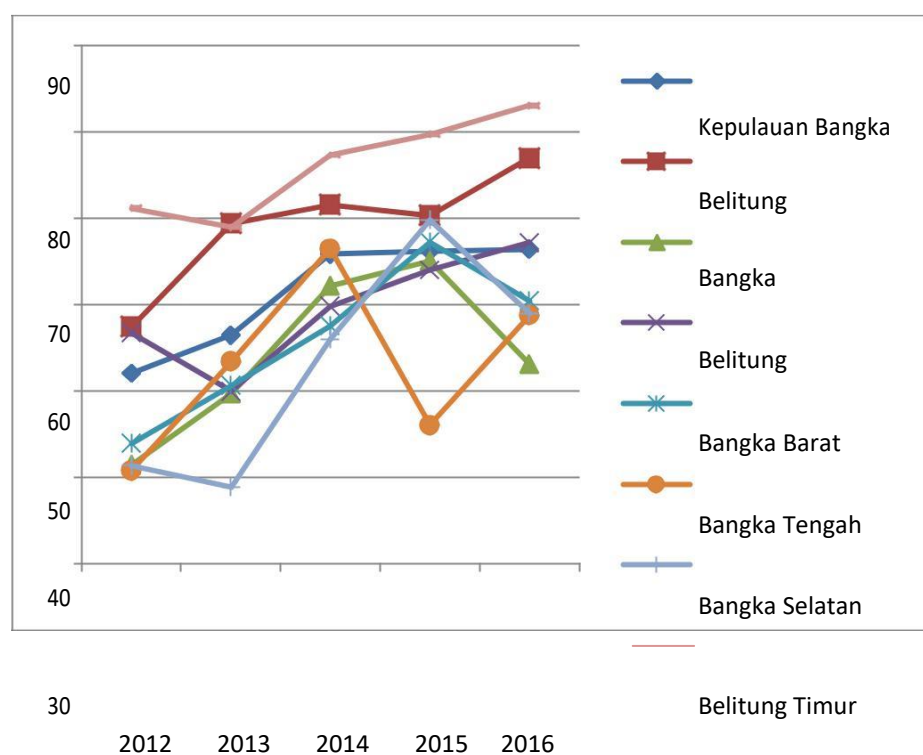
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Musianto (2002), yang dimaksud dengan metode kuantitatif adalah pendekatan yang penulisannya menggunakan aspek pengukuran yang meliputi usulan penelitian proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data. Sementara, Mulyadi (2011) menyatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam pendekatan kuantitatif yaitu kemampuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian; bagaimana hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi.

Analisis data yang dipergunakan yaitu data yang diperoleh dari pengambilan sampel regresi sederhana. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari data BPS Provinsi Kepulauan Bangkabelitung yang berisi data angka partisipasi sekolah, data tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung yang terbagi atas enam kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

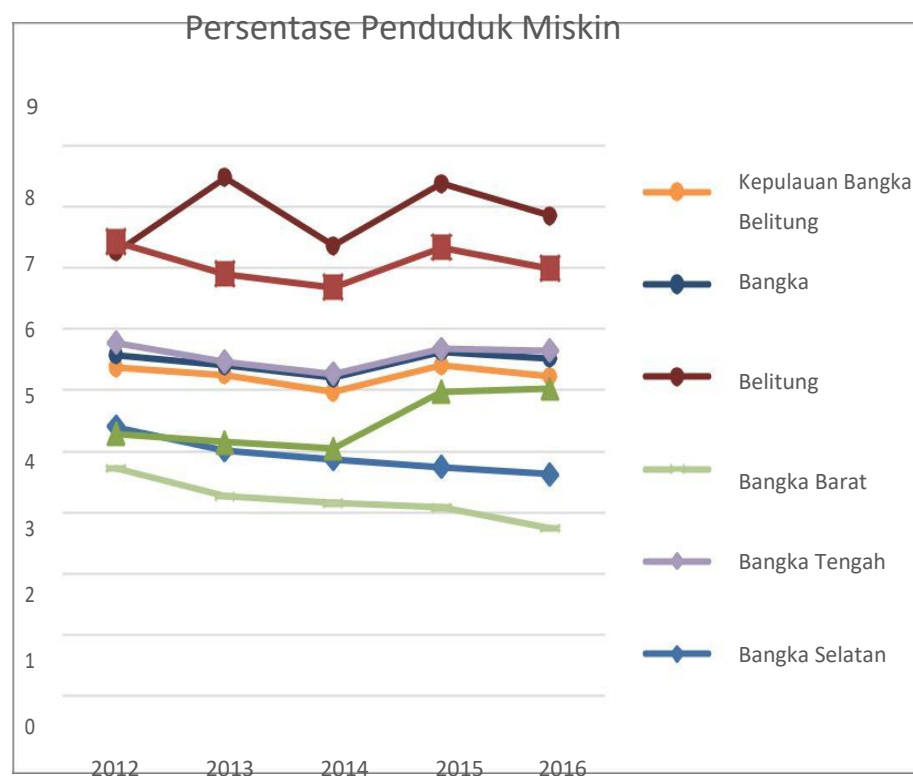
Provinsi Kepulauan Bangkabelitung terbagi atas enam kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur dan satu kota, yaitu Kota Pangkalpinang. Data untuk angka partisipasi sekolah diambil dari BPS Provinsi Kepulauan Bangkabelitung yang terakhir dibarukan pada 14 Juni 2017. Angka Partisipasi Sekolah 16—18 Tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 1 . Grafik perbandingan angka partisipasi sekolah pada usia 16—18 tahun di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung

Berdasarkan grafik di atas, dapat diartikan bahwa angka partisipasi sekolah jenjang sekolah menengah atas masing-masing kabupaten/kota pada 2012 sampai dengan 2016 terjadi tren peningkatan. Pada daerah yang lain yaitu Kabupaten Bangka Selatan sempat mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, tetapi kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sampai 2015, dan pada akhirnya mampu meningkat kembali pada tahun 2016. Hal yang sama terjadi juga pada tiga daerah yang lain, yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Lain halnya dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka yang justru terus mengalami peningkatan pada angka partisipasi sekolah dan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangkabelitung. Terlihat juga pada Kabupaten Bangka Tengah pada 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan meski mengalami sedikit penurunan pada 2016.

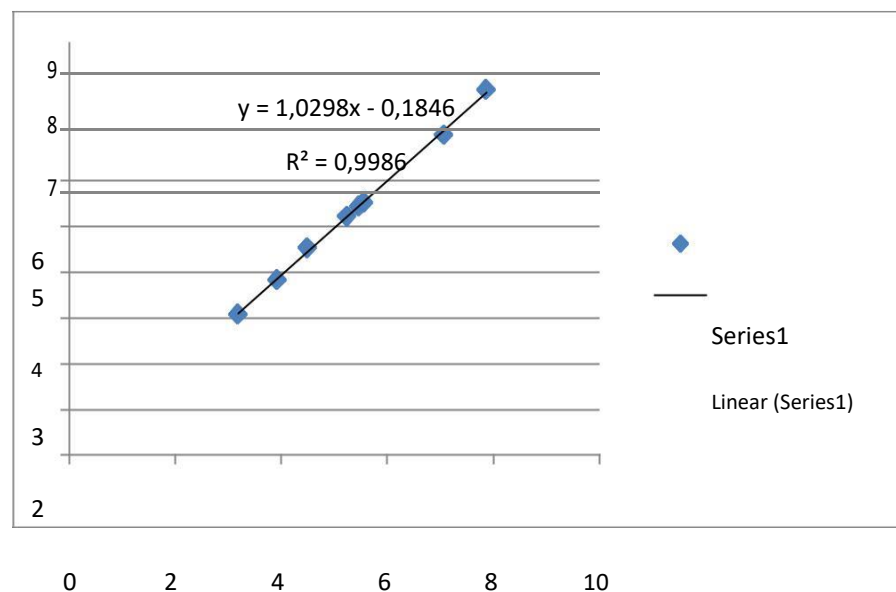
Untuk kondisi angka partisipasi sekolah sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini dilakukan pengujian hubungan dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung dari 2012 sampai 2016 rata-rata mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Kondisi tingkat kemiskinan dapat dilihat dari data grafik sebagai berikut.



Gambar 2 . Grafik persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung

Berdasarkan grafik di atas dapat diartikan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung mengalami penurunan. Terdapat empat daerah yaitu Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka yang memiliki persentase tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Masih terdapat daerah yang memiliki persentase tingkat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, yaitu Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang. Untuk Kabupaten Bangka Barat, tingkat kemiskinan terus menerus mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 2015. Berbeda dengan Kota Pangkalpinang, pada tahun 2014 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Kondisi berbeda dialami oleh Kabupaten Belitung, yaitu tingkat kemiskinan selalu mengalami perubahan setiap tahunnya; selalu naik kemudian turun kembali sampai tahun 2016. Hal lain yang dialami oleh Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan hampir stabil untuk tingkat kemiskinannya.

Korelasi angka partisipasi sekolah (APS) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung dapat diketahui dengan perolehan data APS dan persentase kemiskinan di Bangkabelitung. Dengan adanya data angka partisipasi sekolah (2012—2016) dan juga data tingkat kemiskinan (2012—2016), dapat diketahui korelasi antara angka partisipasi sekolah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan. Melihat kondisi tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung dengan membaca grafik di atas, peneliti mencoba menghubungkan antara angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Bangkabelitung dengan metode regresi yang dapat dilihat dari gambar grafik regresi berikut.



Gambar 3 : Grafik Regresi hubungan antara angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung

Dari grafik di atas terlihat hubungan yang sangat kuat antara angka partisipasi sekolah dengan tingkat kemiskinan yang dibuktikan dengan koefisien determinasi Pearson (R^2) sebesar 0.99 dengan nilai p -value dan *significance* F hampir mendekati 0 (nol) yang menunjukkan bahwa 99,999% dari data menjelaskan adanya hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka partisipasi sekolah. Untuk jenjang sekolah menengah atas masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangkabelitung pada 2012 sampai dengan 2016 terjadi tren peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat Bangkabelitung akan pentingnya pendidikan dan tingkat kemakmuran masyarakat yang semakin meningkat. Pada tahun 2014 sampai 2015, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena perekonomian di Bangka Selatan mengalami penurunan atau kemampuan ekonomi masyarakat rendah. Hal yang sama terjadi juga pada tiga daerah lain yaitu Belitung, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Lain halnya di dua daerah yang berbeda yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan untuk angka partisipasi sekolah sebanding lurus dengan tingkat kemiskinan kedua daerah ini yang semakin menurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) usia 16—18 rentang tahun 2012 hingga 2016 sejalan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangkabelitung mengalami tren peningkatan, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan meski tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi angka partisipasi sekolah, maka semakin baik pula perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bangkabelitung.

Maka, solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat menanggulangi masalah rendahnya angka partisipasi sekolah di setiap kabupaten/kota Provinsi Bangkabelitung, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS). Hal ini dilakukan dengan perlu adanya penyebaran dan pemerataan pendidikan di Bangkabelitung yang selama ini sulit terjangkau dan minimnya fasilitas pendidikan, dan memperluas akses bagi anak usia sekolah khususnya usia 16—18 tahun. Laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan pada setiap jenjang yang dijalani serta memperluas akses bagi yang belum terlayani jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Deni. (2015). Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah Kependidikan* 2 (3): 231—239
- Astuti, Tri Puji. (2016). Angka Partisipasi Sekolah (APS). <<http://pekalonganbersekolah.pekalongankota.go.id/angka-partisipasi-sekolah-aps/>> Diakses pada tanggal 09 Juni 2018 Pukul 23.00 WIB.
- Dewi, V.R., S. Astutik, dan H. Pramoedyo. (2015). Penentuan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Menggunakan *Geographically Weighted Regression* dengan Metode *Stepwise*. *Jurnal Mahasiswa Statistik* 3(2): 93—96
- Djojohadikusumo, S. (1995). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Hartono, Djoko. (2008). Akses Pendidikan Dasar: Kajian Dari Segi Transisi SD Ke SMP. *Jurnal Kependudukan Indoensia* 3(2): 45—73
- Kumalasari, Merna. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 19
- Manarung, Febri dan Santoso, Dwi. (2015). Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang: 1—9
- Mulyadi, Muhammad. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15(1).127—138
- Musianto, Lukas. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 4(2). 123—136.
- Nirwana, I. D. (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin: Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa pada Tahun 2006-2011. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* Malang: 1—9
- Nurkse, Ragnar. (1993). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Robert Chambers. (1993)terjemahan Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3S.
- Sugianto, Eddy. (2017). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Tingkat Sma Di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inderagiri Hulu. *JOM Fisip* 4(1): 1—14

Suryana, S. (2007). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Partisipasi Sekolah*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Hal 3.

Ustama, D. D. 2009. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik* 6(1): 1—12

The World Bank. 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. The World Bank Office Jakarta, Jakarta.